



Kebijakan Ekonomi Publik Intervensi Pemerintah terhadap Eksternalitas dan Ketimpangan Pendapatan

Fiola Surya Dwi Fahmi^{1*}, Hendra Riofita²

^{1,2}Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: fiolasuryadwifahmi@gmail.com, hendrariofita@yahoo.com

Korespondensi penulis : fiolasuryadwifahmi@gmail.com*

Abstract : *Public economic policy is a crucial instrument in addressing various forms of market failure, such as negative externalities and income inequality. In this context, government intervention through taxation, subsidies, and redistribution serves as a strategic step to achieve a balance between economic efficiency and social equity. This article aims to examine the role of public economic policy in correcting the impact of externalities and reducing the gap in income distribution. Using a qualitative descriptive approach and literature study method, the results show that Pigovian taxes, subsidies for positive sectors, progressive tax systems, and data-based redistribution programs are key pillars in building a fairer and more inclusive economic system.*

Keywords: *Externalities, Government Intervention, Income Inequality, Progressive Taxation, Public Economic Policy.*

Abstrak : Kebijakan ekonomi publik merupakan instrumen penting dalam menghadapi berbagai bentuk kegagalan pasar, seperti eksternalitas negatif dan ketimpangan pendapatan. Dalam konteks ini, intervensi pemerintah melalui pajak, subsidi, dan redistribusi menjadi langkah strategis untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran kebijakan ekonomi publik dalam mengoreksi dampak eksternalitas serta mereduksi kesenjangan distribusi pendapatan di masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi pustaka, hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak pigovian, subsidi untuk sektor positif, sistem pajak progresif, serta program redistribusi berbasis data merupakan pilar utama dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif.

Kata Kunci: Kebijakan Ekonomi Publik, Eksternalitas, Ketimpangan Pendapatan, Pajak Progresif, Intervensi Pemerintah

1. LATAR BELAKANG

Dalam upaya menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, kebijakan ekonomi publik memegang peranan sentral. Tujuan utamanya adalah mencapai keseimbangan antara efisiensi ekonomi—yakni pemanfaatan sumber daya secara optimal—dan keadilan sosial, yaitu distribusi hasil ekonomi yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pasar sering kali gagal mencapai keseimbangan tersebut karena adanya faktor-faktor eksternal yang tidak tercermin dalam harga pasar.

Salah satu bentuk kegagalan pasar yang paling nyata adalah eksternalitas, yaitu dampak aktivitas ekonomi terhadap pihak lain di luar transaksi pasar, baik dalam bentuk positif maupun negatif. Misalnya, polusi dari kegiatan industri yang merugikan masyarakat sekitar tanpa adanya kompensasi, atau manfaat dari riset dan pengembangan yang tidak sepenuhnya dinikmati oleh pelakunya. Ketika biaya atau manfaat sosial tidak

sejalan dengan biaya atau manfaat privat, maka timbul distorsi yang memerlukan intervensi kebijakan (Riofita, 2024, hlm. 4).

Selain eksternalitas, ketimpangan pendapatan juga menjadi masalah serius yang dapat menghambat stabilitas ekonomi dan sosial. Kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin bukan hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga melemahkan daya beli, mengurangi partisipasi ekonomi, serta meningkatkan risiko konflik sosial. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan intervensi melalui berbagai instrumen kebijakan, seperti pajak progresif, subsidi bagi kelompok rentan, serta program redistribusi pendapatan yang berbasis data akurat dan menyeluruh (Riofita, 2024, hlm. 7).

Lebih jauh, dalam era globalisasi dan ekonomi digital saat ini, tantangan terhadap kebijakan ekonomi publik menjadi semakin kompleks. Mobilitas modal yang tinggi, ketergantungan antarnegara, serta transformasi teknologi menuntut pemerintah untuk terus menyesuaikan strategi intervensinya. Peran negara tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga fasilitator dan katalisator perubahan, agar struktur ekonomi tetap adil dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Dengan demikian, pemahaman mendalam mengenai peran intervensi pemerintah dalam mengatasi eksternalitas dan ketimpangan pendapatan menjadi sangat penting. Kebijakan ekonomi publik harus dirancang secara adaptif, berbasis bukti, dan berkelanjutan agar mampu menjawab dinamika sosial-ekonomi serta menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil.

2. KAJIAN TEORITIS

Eksternalitas dan Kebijakan Pajak/Subsidi

Eksternalitas merupakan kondisi ketika aktivitas ekonomi suatu pihak memberikan dampak terhadap pihak lain di luar mekanisme pasar. Dampak ini bisa bersifat negatif, seperti pencemaran udara dari industri, atau positif, seperti pendidikan yang meningkatkan produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Dalam kasus eksternalitas negatif, pasar gagal mencerminkan biaya sosial yang sesungguhnya karena pelaku ekonomi tidak menanggung seluruh beban dari aktivitasnya. Akibatnya, terjadi over-produksi atau konsumsi yang berlebihan dari aktivitas yang merugikan pihak ketiga.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah dapat menginternalisasi eksternalitas dengan menerapkan pajak pigovian, yaitu pajak yang dikenakan setara dengan besarnya kerugian sosial yang ditimbulkan. Misalnya, pajak karbon pada perusahaan yang menghasilkan emisi gas rumah kaca bertujuan untuk meningkatkan biaya

aktivitas pencemaran dan mendorong perusahaan mencari solusi yang lebih ramah lingkungan. Di sisi lain, untuk eksternalitas positif seperti penggunaan energi terbarukan, pemerintah dapat memberikan subsidi guna menurunkan biaya produksi dan memperluas adopsi teknologi bersih (Riofita, 2024, hlm. 5).

Kebijakan ini tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga menciptakan insentif ekonomi bagi pelaku pasar untuk mengubah perilakunya ke arah yang lebih efisien secara sosial. Efektivitas kebijakan ini sangat tergantung pada akurasi perhitungan biaya eksternal dan ketepatan desain instrumen fiskal yang digunakan.

Ketimpangan Pendapatan dan Redistribusi

Ketimpangan pendapatan menjadi tantangan struktural dalam banyak negara, termasuk Indonesia. Ketika kekayaan terakumulasi hanya pada sebagian kecil kelompok masyarakat, maka potensi gejolak sosial dan penurunan kesejahteraan kolektif semakin besar. Ketimpangan juga berdampak pada keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi lainnya bagi kelompok berpendapatan rendah.

Redistribusi pendapatan melalui intervensi pemerintah menjadi salah satu pendekatan utama dalam meredam ketimpangan ini. Terdapat dua instrumen utama yang dapat digunakan:

- a. Transfer tunai dan program bantuan sosial, seperti bantuan langsung tunai (BLT), subsidi pendidikan dan kesehatan, serta program perlindungan sosial lainnya.
- b. Sistem pajak progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan wajib pajak. Hal ini bertujuan agar mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar memberikan kontribusi fiskal yang lebih tinggi sebagai bentuk tanggung jawab sosial (Riofita, 2024, hlm. 6).

Dengan menerapkan kebijakan redistribusi yang berbasis data, pemerintah tidak hanya menanggulangi kemiskinan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan memperluas basis ekonomi nasional.

Fungsi Pemerintah dalam Ekonomi

Dalam kerangka teori ekonomi publik, peran pemerintah sangat penting dalam mengatasi kegagalan pasar dan menciptakan keseimbangan sosial. Mengacu pada pandangan klasik dalam ekonomi publik, fungsi pemerintah terbagi menjadi tiga aspek utama:

a) Fungsi Alokasi

Pemerintah berperan dalam penyediaan barang publik dan mengoreksi eksternalitas. Barang publik seperti jalan, keamanan, dan pencahayaan umum tidak bisa disediakan secara efisien oleh mekanisme pasar karena bersifat non-rival dan non-excludable. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir untuk memastikan barang-barang tersebut tersedia dan dapat diakses secara merata oleh masyarakat.

b) Fungsi Distribusi

Fungsi ini berkaitan erat dengan kebijakan redistribusi pendapatan. Pemerintah berupaya untuk menyeimbangkan hasil distribusi ekonomi melalui instrumen fiskal, baik dalam bentuk subsidi maupun sistem pajak progresif. Tujuannya adalah menciptakan sistem sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan.

c) Fungsi Stabilisasi

Dalam menjaga stabilitas makroekonomi, pemerintah mengatur siklus ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Intervensi ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Ketiga fungsi ini saling terkait dan menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan ekonomi publik yang efektif. Dalam konteks eksternalitas dan ketimpangan pendapatan, ketiga fungsi tersebut berpadu untuk menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil dan efisien.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggali konsep-konsep teoretis dan mendalam mengenai kebijakan ekonomi publik, khususnya dalam konteks intervensi pemerintah terhadap eksternalitas dan ketimpangan pendapatan. Pendekatan ini tidak berfokus pada pengumpulan data kuantitatif atau eksperimen lapangan, melainkan pada eksplorasi literatur ilmiah guna membangun argumen yang logis, sistematis, dan kritis.

Sumber Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder yang kredibel dan relevan, di antaranya:

- Jurnal ilmiah nasional dan internasional, terutama jurnal multidisiplin yang membahas isu kebijakan ekonomi, fiskal, dan distribusi pendapatan;
- Buku akademik terbaru, khususnya karya dari Hendra Riofita, yang banyak membahas topik kebijakan publik dan ekonomi;
- Dokumen kebijakan pemerintah, laporan riset, serta publikasi resmi dari instansi yang relevan, sebagai data pendukung.

Penggunaan literatur-literatur tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan ekonomi publik dirancang dan diimplementasikan dalam merespons kegagalan pasar.

Teknik Analisis Data

Proses analisis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi dan pengumpulan literatur yang relevan dengan isu eksternalitas dan ketimpangan pendapatan;
- 2) Klasifikasi konten berdasarkan tema: eksternalitas (negatif dan positif), redistribusi pendapatan, serta fungsi pemerintah dalam ekonomi;
- 3) Kaji ulang dan sintesis pemikiran para ahli, khususnya gagasan Hendra Riofita, untuk memahami secara utuh landasan teoretis dan praktis dalam kebijakan intervensi;
- 4) Interpretasi dan penyusunan narasi deskriptif yang menghubungkan konsep-konsep teori dengan realitas kebijakan ekonomi publik di Indonesia;
- 5) Kritisasi kebijakan eksisting, dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan intervensi pemerintah, serta potensi perbaikan kebijakan ke depan.

Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha menggambarkan secara menyeluruh bagaimana teori-teori ekonomi publik dapat digunakan sebagai landasan dalam merancang kebijakan yang mampu mengoreksi eksternalitas dan menekan ketimpangan pendapatan secara efektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam kebijakan ekonomi publik memiliki peran sentral dalam mengoreksi berbagai kegagalan pasar, khususnya eksternalitas dan ketimpangan pendapatan. Pembahasan berikut menguraikan

bagaimana instrumen-instrumen kebijakan digunakan untuk mencapai efisiensi ekonomi dan keadilan sosial di Indonesia.

Pajak Pigovian sebagai Koreksi Eksternalitas

Pajak pigovian merupakan instrumen fiskal yang digunakan untuk menginternalisasi biaya sosial dari aktivitas ekonomi yang menimbulkan dampak negatif bagi pihak ketiga. Contoh nyata dari penerapan kebijakan ini adalah pajak karbon dan cukai rokok. Pajak ini memaksa pelaku usaha dan konsumen untuk menanggung sebagian dampak sosial yang sebelumnya diabaikan dalam keputusan ekonominya.

Menurut Riofita (2024, hlm. 5), pajak pigovian yang dirancang secara tepat dan berbasis data empiris dapat mengurangi kerugian eksternal secara signifikan serta mendorong perubahan perilaku menuju aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, penerimaan dari pajak pigovian dapat dialokasikan untuk membiayai program-program sosial, seperti subsidi energi hijau atau bantuan kesehatan masyarakat miskin yang terdampak oleh polusi.

Namun, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kemampuan negara dalam melakukan evaluasi dampak ekonomi dan lingkungan secara berkala, serta pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha. Di Indonesia, tantangan terbesar terletak pada political will dan resistensi dari industri yang terkena dampak langsung, seperti sektor energi berbasis batu bara dan industri tembakau.

Subsidi dan Stimulasi Aktivitas Ekonomi Positif

Selain membatasi eksternalitas negatif, pemerintah juga memberikan subsidi kepada sektor-sektor yang menghasilkan eksternalitas positif, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan energi terbarukan. Subsidi ini bertujuan untuk menurunkan biaya dan meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan yang secara tidak langsung meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Riofita (2024, hlm. 6) menegaskan bahwa pemberian subsidi harus berdasarkan pertimbangan efisiensi dan manfaat sosial jangka panjang, bukan hanya pertimbangan politik sesaat. Misalnya, subsidi kendaraan listrik tidak hanya mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga dapat membuka peluang industri baru yang berbasis teknologi ramah lingkungan.

Meskipun demikian, tantangan dalam kebijakan subsidi antara lain adalah ketidaktepatan sasaran, potensi moral hazard, dan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Oleh karena itu, subsidi harus didesain dengan mekanisme exit strategy serta indikator keberhasilan yang terukur, agar tidak menjadi beban fiskal berkepanjangan.

Redistribusi Pendapatan untuk Keadilan Sosial

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu isu paling mendasar dalam ekonomi publik. Distribusi kekayaan yang timpang tidak hanya menciptakan kecemburuan sosial, tetapi juga dapat menurunkan demand agregat dan menciptakan instabilitas politik. Pemerintah merespons hal ini melalui berbagai kebijakan redistribusi, seperti:

- Bantuan sosial tunai bersyarat (PKH)
- Jaminan kesehatan nasional (JKN)
- Pendidikan gratis
- Subsidi pangan dan energi untuk masyarakat miskin

Riofita (2024, hlm. 4) menyatakan bahwa keberhasilan redistribusi sangat ditentukan oleh validitas data dan kapasitas kelembagaan. Tanpa data yang akurat, bantuan dapat salah sasaran dan justru memperkuat ketimpangan struktural. Oleh karena itu, integrasi sistem data kependudukan dan pemantauan digital menjadi langkah penting yang harus diperkuat.

Selain itu, redistribusi harus dipadukan dengan program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu keluar dari siklus kemiskinan secara mandiri.

Pajak Progresif dan Keadilan Fiskal

Pajak progresif menjadi instrumen utama dalam menyeimbangkan distribusi pendapatan melalui sistem perpajakan yang membebankan tarif lebih tinggi pada kelompok berpenghasilan besar. Ini merupakan bentuk keadilan vertikal dalam sistem fiskal.

Namun dalam praktiknya, implementasi pajak progresif di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti:

- Rendahnya kepatuhan wajib pajak
- Kesenjangan data antara penghasilan riil dan pelaporan pajak
- Dominasi sektor informal dalam struktur ekonomi

Menurut Riofita (2024, hlm. 6), untuk mencapai keadilan fiskal yang kredibel, diperlukan transparansi dalam pengelolaan pajak, digitalisasi sistem perpajakan, serta penegakan hukum yang konsisten. Masyarakat akan lebih rela membayar pajak apabila melihat manfaatnya secara langsung, seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik yang bermutu.

Peningkatan literasi pajak masyarakat juga menjadi faktor penting agar sistem pajak progresif tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga alat edukatif dan transformasional dalam ekonomi.

Tantangan Implementasi Kebijakan

Meskipun arah kebijakan ekonomi publik di Indonesia sudah mencakup koreksi eksternalitas dan redistribusi pendapatan, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan utama:

- a. Rendahnya literasi fiskal masyarakat, yang menyebabkan resistensi terhadap pajak dan ketergantungan terhadap subsidi;
- b. Lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah, terutama dalam integrasi data penerima manfaat dan pelaporan fiskal;
- c. Kurangnya evaluasi kebijakan berbasis bukti, sehingga intervensi sering kali bersifat jangka pendek dan populis;
- d. Kesenjangan teknologi dan infrastruktur digital, yang menghambat proses digitalisasi dan pengawasan program redistribusi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan tata kelola fiskal, modernisasi sistem perpajakan, serta penerapan pendekatan berbasis data dan teknologi informasi dalam perencanaan serta evaluasi kebijakan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kebijakan ekonomi publik memiliki peranan penting dalam mengatasi kegagalan pasar, khususnya dalam hal eksternalitas negatif dan ketimpangan distribusi pendapatan. Pemerintah sebagai agen korektif bertindak melalui instrumen fiskal seperti pajak pigovian dan subsidi, serta kebijakan redistribusi pendapatan untuk menjamin tercapainya kesejahteraan sosial yang merata.

Penerapan pajak pigovian terbukti efektif dalam menekan aktivitas ekonomi yang menimbulkan dampak sosial negatif, seperti polusi dan konsumsi produk berisiko tinggi. Sementara itu, subsidi terhadap sektor strategis seperti pendidikan dan energi terbarukan mampu mendorong aktivitas ekonomi yang bermanfaat secara luas.

Dalam hal ketimpangan pendapatan, kebijakan redistribusi melalui bantuan sosial, layanan publik gratis, dan sistem pajak progresif telah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap peningkatan keadilan sosial. Meski demikian, efektivitas seluruh kebijakan tersebut sangat tergantung pada validitas data, kapasitas kelembagaan, dan komitmen politik.

Berbagai tantangan seperti rendahnya literasi fiskal, ketidaktepatan sasaran bantuan, dan lemahnya sinergi antarinstansi menunjukkan bahwa reformasi kebijakan ekonomi publik di Indonesia masih memerlukan penguatan yang sistematis dan berkelanjutan.

Saran

1. Peningkatan Literasi Ekonomi dan Fiskal Masyarakat

Pemerintah dan institusi pendidikan perlu memperkuat pendidikan publik tentang fungsi pajak dan subsidi agar masyarakat lebih memahami dan mendukung kebijakan ekonomi yang diterapkan.

2. Digitalisasi dan Integrasi Sistem Data Antarinstansi

Pemerintah perlu mengembangkan sistem data terintegrasi berbasis digital untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran serta efisiensi dalam sistem perpajakan dan pelaporan fiskal.

3. Evaluasi Berkala terhadap Efektivitas Kebijakan

Setiap intervensi pemerintah harus disertai dengan evaluasi berbasis data untuk menilai dampak riil terhadap kesejahteraan masyarakat dan mencegah kebijakan yang bersifat populis tanpa manfaat jangka panjang.

4. Penguatan Sistem Pajak Progresif yang Transparan dan Adil

Reformasi perpajakan harus diarahkan pada penguatan kepatuhan, transparansi, dan efisiensi sistem, dengan memperhatikan kemampuan bayar masing-masing golongan masyarakat.

5. Kolaborasi Lintas Sektor dalam Perumusan Kebijakan

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global, kebijakan ekonomi publik harus melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan adaptif.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan ekonomi publik di Indonesia mampu mengoreksi kegagalan pasar, memperkuat keadilan sosial, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, B. (2018). *Manajemen pemasaran dan pemasaran jasa*. Alfabeta.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Fandy, T. (2014). *Perilaku konsumen dalam perspektif pemasaran*. Andi.
- Hadiati, E., Suroya, A., Ningsih, I., Wahyuni, S., & Yuliaputri, T. (2025). Memahami perencanaan sumber daya manusia: Strategi, implementasi, dan dampak. *Inovasi Pendidikan Nusantara*, 6(1).
- Hasibuan, M. S. P. (2017). *Manajemen sumber daya manusia* (Edisi revisi). Bumi Aksara.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Manajemen pemasaran* (Edisi ke-13, terjemahan). Erlangga.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2015). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (2015). *Manajemen sumber daya manusia untuk bisnis yang kompetitif*. Gadjah Mada University Press.
- Riofita, H. (2023). Bentuk peranan guru dalam memberikan pendidikan kepemimpinan: Motivator, leader, problem solver. *Jurnal Pendidikan Kepemimpinan*, 2(2).
- Riofita, H. (2024). Pengaruh motivasi finansial dan nonfinansial terhadap kinerja karyawan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen dan Kinerja Pegawai*, 5(1).
- Riofita, H. (2024). Predicting Muslim female customer retention through Islamic marketplace attractiveness. *Jurnal Ekonomi Islam dan Digital*, 3(1).
- Rivai, V., & Sagala, E. J. (2012). *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan: Dari teori ke praktik*. Rajawali Pers.
- Sari, A., & Riofita, H. (2024). Mengoptimalkan strategi pemasaran untuk mencapai target pasar yang tepat. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 8(11).

Setiadi, N. J. (2020). *Perilaku konsumen: Perspektif kontemporer pada motivasi, perilaku, dan strategi pemasaran*. Kencana.

Siagian, S. P. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-26). Alfabeta.

Wulandari, I., & Riofita, H. (2024). Pasar konsumen dan perilaku konsumen. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 8(11).